

TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI DI P.G. POERWODADI MAGETAN 1965-1970

Idhofah Fauzi¹⁾
Eni Sugiarti²⁾

Abstrak

Tahun 1975 pemerintah membuat sebuah program yang di kenal dengan nama Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Selain itu untuk menjaga stabilitas penyediaan bahan baku, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghasilan petani, karena sistem yang berlaku sebelumnya (sistem sewa) di nilai kurang menguntungkan bagi petani. Petani dalam sistem sewa hanya menunggu hasil sewa tanahnya, tetapi dalam program TRI petani ikut aktif dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan tebu. Pabrik gula Poerwodadi Magetan merupakan salah satu yang melaksanakan program ini di wilayah kerjanya. Bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah program ini dicanangkan TRI. Berbagai perubahan terjadi pada petani setelah pelaksanaan program ini, baik petani pemilik tanah maupun petani buruh. Mereka megambil bagian penting bagi kelangsungan program ini, karena mereka merupakan pelaksana lapangan dalam hal penanaman sampai dengan penebangan tebu. Hal ini menjadi sangat berpengaruh bagi proses tanam. Karena jika terjadi kesalahan dalam teknis tanam, pemeliharaan sampai dengan masa tebang tebu, sangat berpengaruh terhadap kulaitas tebu yang dihasilkan.

Kata Kunci: Tebu Rakyat Intensifikasi.

Abstract

In 1975 the government created a program known by the name of Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). In addition to maintaining the stability of the supply of raw materials, the program also aims to increase the income of farmers, because the previously existing system (system rental) at a value of less profitable for farmers. Farmers in the rental system just waiting for the results of the lease land, but in the TRI program farmers actively participate in the activities and maintenance planting Poerwodadi Hove cane sugar mill is one that implement this program in their working area. Working closely with national and local government program launched by TRI. Various changes occur in farmers after the implementation of this program, both landowners and farm worker. They are essential for the survival to take part of this program, because they are the field operators in terms of planting to the harvesting of sugarcane. It is becoming very influential for the planting process. Because if there is a technical error in the planting, maintenance until the time of harvesting sugar cane, so influential on kulaitas cane produced.

Keywords: Intensivication Sugarcane People.

1) Mahasiswa di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

2) Dosen di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

Pendahuluan

Setelah melalui proses yang panjang pada tahun 1975 terjadi perubahan sistem dalam perindustrian gula nasional. Hal ini ditandai dengan munculnya kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penghapusan sistem persewaan tanah. Sistem ini diganti dengan program baru yang dikenal dengan istilah TRI atau tebu rakyat intensifikasi. Program ini adalah upaya pemerintah untuk membantu para petani dan pemilik tanah agar bisa lebih sejahtera. Program TRI di Jawa dilaksanakan secara bertahap dan di atur oleh pemerintah dengan bantuan pemerintah daerah masing-masing.

Beberapa daerah yang menjadi tujuan pelaksanaan program ini di Jawa timur, salah satu nya adalah perkebunan tebu di kota Magetan. Magetan merupakan wilayah yang memiliki beberapa pabrik gula yang ikut melaksanakan program TRI, salah satu nya adalah PG. Poerwodadie. Pelaksanaan program TRI di areal wilayah kerja pabrik gula ini terbilang cukup luas cakupannya. Terdapat beberapa daerah di luar wilayah Kabupaten Magetan ikut menjadi bagian wilayah kerja pabrik gula ini.

Secara geografis pabrik gula Poerwodadie berdekatan dengan pabrik gula lain yaitu pabrik gula Soedono, hal ini menyebabkan pasang surut persediaan bahan baku dimungkinkan terjadi. Pengadaan tebu sebagai bahan baku utama pembuatan gula yang terkadang tidak stabil jumlahnya membuat perusahaan harus berusaha keras untuk mencari bahan baku. Tidak jarang terjadi peralihan atau pertukaran lahan penyedia bahan baku.

Meskipun pelaksanaannya di bantu oleh tindakan berbagai pihak baik dari unsur pemerintah pusat sampai dengan yang terbawah (desa) dalam hal ini. Berbagai tahapan program di upayakan oleh pemerintah untuk menunjang kelancaran program. Proses ini banyak di warnai dengan berbagai penolakan dari pihak petani sebagai

pemilik lahan. Penolakan ini merupakan salah satu bentuk protes atas pelaksanaan program TRI karena beberapa alasan baik sebelum terjadinya pelaksanaan program maupun setelah mereka melaksanakan TRI di lahan miliknya.

Jenis-Jenis Perkebunan Tebu di Wilayah Magetan

Bahan baku utama dalam pembuatan gula adalah tanaman tebu, tebu merupakan suatu jenis rumput besar yang tumbuh tegak dengan tinggi sampai 6 meter. Batangnya padat tidak berongga ;berwarna hijau, kuning, atau keunguan; berdiameter 5 centimeter; serta beruasruas dan berpermukaan berlilin. Daunnya menggaris; panjangnya mencapai 1,25 meter dan lebarnya 5 centimeter; pelepahnya berambut panjang dan tajam. Bunganya yang berwarna putih tersusun dalam mali yang muncul di ujung batang; panjang malinya 89 centimeter, sedangkan panjang cabang-cabangnya mencapai 3 centimeter, tanaman ini sudah dibudidayakan secara besar-besaran terutama diambil gulanya, kandungan gulanya 7-29 persen ; kandungan yang terbanyak terdapat pada batang bagian bawah yakni sampai 20 persen. Gula ini terdiri atas, antara lain 0,4 persen *fruktosa* dan 2 persen *laktosa*. Kandungan ini yang kemudian membuat tebu menjadi bahan baku gula.(Poppy, Yuliasri: 2010: 33)

Proses produksi tebu menjadi gula sangat dipengaruhi oleh petani penanam tebu, sebab tanah yang digunakan untuk menanam tebu adalah tanah yang disewa pabrik gula dari petani. Pengertian petani, (wahyudi : 5) menjelaskan dua kategori petani ini antara lain istilah *peasant* lebih diterjemahkan sebagai buruh tani, atau petani yang tidak memiliki lahan, atau petani yang hasil produksinya hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, bukan untuk diperdagangkan guna pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersier. Sedangkan *farmer*, lebih diberi pengertian sebagai petani yang memiliki lahan sendiri, petani

yang hasil produksinya sudah lebih jika hanya untuk kebutuhan sekunder saja. (Akhmad, Fatoni: 2007:39). Mengawali analisa sistem gula di Jawa dari segi sistem perkebunan maka yang menjadi faktor pendukung adalah tanah dan adanya tenaga kerja yang murah. Tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting terutama di Indonesia, yang merupakan salah satu Negara dengan perekonomian nasionalnya di dominasi dengan sektor pertanian. (Undri: 2004: 3)

Proses pengelolaan tebu menjadi gula ini mulai dari pembudidayaan penanaman tebu kemudian sampai dengan pemasarannya, semuanya ditangani oleh pihak pabrik gula sendiri, sedangkan petani pemilik lahan tidak ikut serta dalam semua proses baik produksi maupun pemasarannya. Para petani ini hanya menerima uang sewa tanah yang digunakan oleh pabrik gula untuk ditanami tebu. Hal ini tentu saja sangat merugikan para petani sebagai pemilik lahan. Para petani pemilik atau penanam tebu yang berada dalam wilayah kerja pabrik-pabrik gula, wajib menjual tebunya kepada pabrik gula untuk di giling menjadi kristal gula, baik yang di konsumsi secara langsung maupun tidak langsung. (Soe Hok Gie, 1999:8).

Kemudian di dalam proses perkembangannya terjadi perubahan besar dalam industri gula dan sistem sewa tanah terutama di Jawa karena turun instruksi presiden (inpres) nomer 9 pada tahun 1975, disusul dengan turun nya SK menteri pertanian nomor 022 tahun 1975, mulai saat itu di kembangkan program pemerintah yaitu Tebu rakyat intensifikasi (TRI). Dalam sistem TRI pengolahan tebu dilapangan diserahkan kepada petani sebagai pemilik tanah. Sedang PG terutama hanya bertugas melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis operasional, penyediaan sarana produksi seperti pupuk, pestisida, bibit dan sebagainya, serta menggilingkan tebu milik rakyat yang ada di wilayah kerjanya.

Gambaran wilayah dan masyarakat Magetan tahun 1975-1980.

Menurut sejarah, Magetan dahulu merupakan wilayah kekuasaan kerajaan mataram. Di bawah pemerintahan Sutan Amangkurat I. Kerabat keraton Mataram yang bernama Basah Bibit atau Basah Gondokusumo yang bernama Pangeran Nrang. Seiring perkembangannya Magetan dibawah pimpinan Sasrawinoto (1825) mengalami peristiwa-peristiwa penting diantaranya, tanggal 1 Juli 1830 Belanda mengadakan konferensi di desa Seped (Ngawi) dengan mengundang semua bupati mancanegara wetan yang menghasilkan ketetapan, bahwa semua Bupati Mancanegara Wetan harus menolak kekuasaan sultan Yogyakarta dan Susuhunan Surakarta. Mulai saat itu harus tunduk kepada kekuasaan pemerintah pusat di Batavia. Sejak tahun 1830 itu pula Magetan dibagi menjadi tujuh daerah kabupaten kecil, yaitu Kabupaten Magetan I (Magetan Kota), Kabupaten Magetan II (Plaosan), Kabupaten Magetan III (ploso), Kabupaten Magetan IV (Gorang-Gareng Genengan), Kabupaten Magetan V (Gorang-Gareng Ngadirejo), Kabupaten Maospati, dan Kabupaten Poerwodadie. Tahun 1866 Kabupaten Magetan II dan II di hapuskan dan di gabung dengan Magetan I, sedang tahun 1870 Kabupaten Poerwodadie dihapuskan dan tahun 1880 Kabupaten Maospati juga dihapuskan. Jadi akhirnya kabupaten kecil tadi kembali menjadi satu Kabupaten Magetan. (Anonim: 1987:2).

Pada tahun 1971 telah dibangun Bronkaptering dan perpipaan air bersih sepanjang 11 km dari Sumber Jabung kecamatan Panekan ke desa Ginuk, kecamatan Sukomoro yang sangat kekurangan air. Meskipun demikian, akibat pola kehidupan pada masa Orde Lama yang lebih banyak berorientasi pada politik, kemampuan ekonomi masyarakat memang masih lemah. Pada awal Pelita (1969) ternyata masih ada penduduk Magetan khususnya di desa-desa yang menderita busung lapar. Keadaan

demikian mendorong Pemerintah Kabupaten Magetan bersama instansi yang terkait khususnya Dinas Sosial. Selain itu industri gamelan Kauman Kecamatan Karangrejo juga mulai melebarkan sayap pemasaran. Dan mulai memasarkan sampai ke luar negeri.

Kabupaten magetan merupakan kabupaten yang mempunyai luas wilayah 688,85 km² yang terdiri dari 18 wilayah kecamatan yaitu kabupaten Barat, Kantor, Karangmojo, Purwodadi, Jungke, Taji, Tinap, Boogemrejo, Kawedanan, Jati, Lembeyan, Parang, Poncol, Sarangan, Slagreng, Jejeruk, Gedong kerik, Nitikan, suber dodol. Kabupaten Magetan sendiri mempunyai topografi yang bervariasi, mulai kondisi wilayah yang landai sampai dengan wilayah pegunungan. Wilayah-wilayah yang datar sebagian besar berada di kecamatan Barat, Bendo, Takeran, Kawedanan, Karangrejo, dan Maospati. Wilayah yang bergelombang adalah di Kecamatan Panekan dan Poncol, yang mempunyai ketinggian antara 300 meter sampai lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan daerah terjal atau perbukitan sebagian besar berada di wilayah kecamatan Plaosan. (Sumarwidi 14 April 2014)

Keterkaitan petani dalam mengelola lahan TRI

Pendorong timbulnya program TRI adalah masalah penyediaan areal dan persewaan tanah, karena areal yang tersedia untuk PG semakin lama semakin sempit, hal ini diantaranya di sebabkan oleh laju peningkatan penduduk yang pesat, sehingga perluasan areal pemukiman juga semakin besar. Karena itu nilai tanah semakin meningkat dan harga sewa tanah untuk tebu pun naik. Tetapi jumlah pemilikan lahan yang relatif sempit menyebabkan pendapatan yang diterima petani dari hasil sewanya juga kecil. kemudian adanya persaingan areal tebu dengan komoditi lain terutama tanaman pangan, juga merupakan penyebab nya. Selain itu, masalah

dibidang produksi yang dimulai sejak terjadinya krisis ekonomi dunia (*malaise*) sekitar tahun 1930, dan pecahnya perang dunia kedua sekitar tahun 1941-1945, menyebabkan produksi gula di Indonesia semakin menurun.

Perubahan sosial ini tentunya berpengaruh sangat besar juga menyebabkan kesenjangan antara kecepatan perubahan dengan antisipasi sosial masyarakat, sehingga menyebabkan tumbuhnya masyarakat yang secara sosiologis mempunyai ciri-ciri perkotaan tetapi masih tinggal dalam pola pemukiman pedesaan. Secara empirik akan memunculkan fenomena mudarnya ikatan kekerabatan di kalangan masyarakat, karena masyarakat bukan lagi merupakan masyarakat yang homogen tetapi sudah berubah menjadi masyarakat yang heterogen, berubahnya orientasi masyarakat dari ekonomi jasa kepada ekonomi uang serta mulai berkurangnya sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat, serta ketergantungannya kepada alam. Lambat laun kemandirian masyarakat menjadi berkurang, dan ketergantungannya terhadap orang lain menjadi semakin besar. Perubahan orientasi ekonomi jasa menjadi ekonomi uang juga telah menggeserkan fungsi rumah dari sebagai tempat berkumpulnya keluarga dan tempat berlindung menjadi komoditi (dimanfaatkan untuk menghasilkan laba) dan tempat usaha. Penelitian ini bertujuan melihathubungan dan faktor dominan antara perubahan sosial akibat pembangunan kawasan industri dengan pola pemukiman petani.

Penerapan Tebu Rakyat Intensifikasi

Terlaksananya sebuah program tidak lepas dari proses yang panjang sebelum benar-benar diterapkan dalam masyarakat. Sama halnya dengan penerapan program TRI di Indonesia. Berbagai persiapan dilakukan oleh pemerintah dalam hal sarana dan prasarana pelaksanaan program ini. persiapan ini dilakukan mulai dari

pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota sampai dengan element terkecil dari pemerintahan desa sebagai wilayah sasaran dari pelaksanaan program ini.

Setelah melakukan berbagai koordinasi, kemudian pemerintah kota melakukan pertemuan di masing-masing kabupaten daerah dan mengumpulkan semua kepala desanya. Disini kepala desa di berikan arahan dan pengertian pentingnya melaksanakan TRI didesanya masing-masing . Kemudian setelah pertemuan ini, dilakukan koordinasi penyuluhan desa ke desa dengan tujuan agar semua masyarakat mau mengikuti dan menjalankan program ini. Setelah jadwal tersusun, maka tim satuan Bimas ini bergerak menuju desa-desa yang sudah di tentukan. Warga di kumpulkan di rumah kepala desa untuk mendapatkan penyuluhan program TRI dari satuan pelaksana Bimas. Kedatangan satuan pelaksana Bimas ini bersama dengan pemerintah daerah kabupaten dan juga dari pihak perusahaan gula. Setelah dilakukan penyuluhan, beberapa bulan kemudian diadakan pertemuan lagi di kabupaten. Kepala desa diminta menyiapkan tanah dan petani yang akan melaksanakan TRI. Karena tidak ada yang dengan sukarela menyerahkan tanahnya untuk ditanami tebu sehingga dilakukan rapat desa oleh semua pamong desa untuk menentukan tanah milik siapa saja yang harus di TRI kan. Setelah itu mau tidak mau petani yang tanahnya terkena hitungan yang harus ikut TRI menyerahkan tanahnya untuk di tanami tebu. (Suparman, 21 april 2014)

Untuk membantu petani dan pemerintah melaksanakan program TRI ini maka banyak pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan dari program ini. Dasar kebijakan dilakukan sesuai dengan inpres no 9 tahun 1975 dan kepres RI no 6 tahun 1979 serta keputusan Gubernur kelapa daerah tingkat I Jawa timu nomor III tahun 1980. pemerataan program dilaksanakan mulai di pusat sampai dengan unit terkecil

daerah.

Dalam pelaksanaan program TRI ini wilayah penanaman tebu di PG poerwodadie ini dibagi menjadi beberapa wilayah yang masing-masing di pegang oleh seorang sinder kebun. Kemudian di dalam satu wilayah ini di bagi menjadi beberapa kelompok TRIS yang terdiri dar 10-20 kelompok petani, setiap kelompok TRIS di koordinir oleh seorang ketua petani yang bertugas sebagai pengelola pelaksanaan teknis penanaman tebu di lapangan. Luas setiap kelompok TRIS berkisar antara 10-15 hektar yang terdiri dari 30-75 petani. Kelompok-kelompok ini dibentuk berdasarkan lokasi tanah milik petani dalam satu desa, bukan berdasarkan domisili petani pemilik tanah. Pengelompokan ini bertujuan agar pengelolaan usaha penanaman tebu ini menjadi lebih baik. Kemudian setiap anggota kelompok petani ini menjadi anggota dari KUD.

Sejarah Singkat Pabrik Gula Poerwodadie

Pabrik gula poerwodadie terletak di jalan utama penghubung antara kota Madiun dengan kota Ngawi, tepatnya di desa Pelem Kecamatan Karangrejo kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Wilayah administrasi PG Poerwodadie sendiri adalah sebagai berikut; di sebelah barat dibatasi oleh lereng gunung Lawu, di sebelah utara dibatasi oleh PG Soedono, di sebelah selatan dibatasi oleh PG Redjosarie dan di sebelah timur dibatasi oleh PG Kanigoro dan Redjoagung. Poerwodadie sendiri di ambil dari nama kabupaten kecil yang dulunya merupakan pecahan dari wilayah kabupaten Magetan.

Pabrik gula Poerwodadie didirikan pada tahun 1832 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan nama "*Nedherland Hendels Maatschapij* (NHM)". Tahun 1981 PNP ini menggabungkan persero-persero yang ada antara lain PTP XV-XVI, PTP XXI-XXII, PTP XXIV-XXV, kemudian berubah nama menjadi PTP XX (Persero) Pabrik Gula Poerwodadie.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tanggal 14 Februari 1996 Mulai tanggal 17 Mei 1996 PTP XX (Persero) dan PT. XXIV-XXV (Persero) di bubarkan kemudian pada tanggal 11 Maret 1996 dibentuk perusahaan baru dengan nama PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) yang berkedudukan di Surabaya. (Prasetya, 2007:1)

Sistem Pengolahan Lahan Pertanian di Magetan oleh P.G. Poerwodadi

Setelah dihapusnya sistem tanam paksa, pabrik gula di Jawa menyewa lahan dari rakyat untuk ditanami tebu. Untuk mengatur persewaan tanah, pada tahun 1918 dikeluarkanlah ordonasi sewa tanah (*Grondhuur Ordonatie*) yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura kecuali Yogyakarta dan Surakarta. Dengan adanya peraturan ini maka pabrik gula bisa menyewa tanah rakyat selama 21,5 tahun. Selama masa sewa setiap dua tahun sekali tanah diserahkan kepada pemilik tanah untuk digarap. Dari kebijakan ini timbul istilah yang dikenal dengan Sistem Gleban. Dalam sistem ini tanah dalam satu wilayah di bagi menjadi tiga bagian (Glebag), dimana setiap tahun satu bagian diserahkan kepada pabrik gula untuk di sewa dan dua bagian disediakan untuk tanaman pangan. Tetapi karena umur tebu lebih dari satu tahun, dalam prakteknya selama periode peralihan jumlah areal yang ditanami tanaman tebu dapat mencapai dua bagian dan hanya tinggal satu bagian untuk tanaman pangan. Sehingga petani yang seharusnya bisa menikmati hasil panen tanaman pangan selama dua kali hanya bisa sekali panen.

Pelaksanaan sistem TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) dilakukan secara bertahap, dalam kurun waktu lima tahun seluruh lahan sewa telah berhasil di TRI kan. Pabrik gula masih tetap mengusahakan sebagian kecil areal tebu (disebut TS: Tebu Sendiri) yang dilaksanakan diatas tanah HGU (Hak Guna Usaha), walaupun areal milik PG ini sendiri terhitung kecil dan sebagian besar

tebu masih bergantung pada hasil dari tebu rakyat. Keberadaan Tebu Sendiri (TS) di lingkungan pabrik gula sendiri menjadi kontroversi, di satu sisi ini menjadi kekuatan bagi pabrik gula saat berhadapan dengan petani/pemasok tebu dan menjadi sumber pendapatan yang baik, karena pengendalian dikendalikan oleh management sehingga peningkatan produktifitasnya tidak menjadi masalah. Hal ini menjadi masalah ketika TS tidak tertangani dengan baik sehingga produktifitasnya rendah dan menguras energi juga mengeluarkan biaya yang besar bagi perusahaan. Sehingga bukan pendapatan yang masuk, melainkan kerugian bagi perusahaan baik finansial maupun rusaknya sistem.

Areal tebu rakyat Indonesia seluruhnya pada tahun 1980 meliputi 99.123 ha, mengalami peningkatan sebesar 8,1 persen jika di banding tahun 1979. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya areal tebu rakyat di Jawa timur sebesar 15,2 persen. Kabupaten Magetan sendiri mempunyai luas wilayah 688,85 Km² dan memiliki topografi dataran sampai pegunungan. Areal penanaman tebu yang akan di giling di PG Poerwodadie sebagian besar merupakan lahan milik petani yang tersebar di wilayah kerja PG, yaitu di Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Ngawi. (Pambudi, 14 april 2014)

Kendala Sosial yang Muncul dalam Pelaksanaan Program TRI dan Penanganannya di Magetan.

Pelaksanaan sebuah program, tentunya tidak akan selalu sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Berbagai hal baik kendala di lapangan disamping adanya dukungan yang didapatkan dari berbagai pihak maka akan terjadi pula berbagai hambatan yang terjadi. Kendala-kendala yang terjadi di dalam pelaksanaan program ini anatara lain adalah sulitnya pabrik gula menemukan petani yang dengan suka rela menyerahkan tanahnya untuk melakukan

program TRI ini disebabkan karena di pengaruhi opini petani sendiri yang meragukan berhasilnya TRI. Anggapan bahwa program ini juga tidak akan berpengaruh besar pada penghasilan para petani, dan juga tuntutan biaya hidup dalam jangka panjang menunggu masa panen serta sempitnya lahan yang dimiliki juga menjadi pertimbangan yang membuat para petani untuk ikut serta dalam program ini. Selama pelaksanaan program ini, di dalam masa tunggu panen petani mendapatkan bantuan kredit bunga rendah dari pemerintah. Selain untuk membiayai usaha tani, kredit itu juga di pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang diberi nama COL (*coat of living*).

Keterlibatan berbagai institusi birokrasi pemerintah di dalam TRI memungkinkan program ini dijalankan melalui praktek *mobilisasi* bahkan *koersi*, dari pada partisipasi petani sebagaimana yang dikehendaki kebijakan inpres No. 9/1975 yang menempatkan petani sebagai "tuan" di atas tanah sendiri. Kerugian yang muncul dari status "tuan" tersebut tak memungkinkan petani keluar dari program, kecuali pilihan menyerahkan tanah tanpa terlibat dalam proses pengolahan. Banyaknya petani yang kurang berminat pada program ini berakibat menurunnya produksi gula tahun 1975-1980, dengan jumlah yang lebih rendah dari tahun 1970-1975. Menurunnya produksi gula ini juga disebabkan oleh tidak maksimalnya proses produksi di tingkat petani, karena banyak petani yang belum melakukan budidaya tanaman tebu sesuai yang seharusnya dilakukan. Mereka rata-rata belum memahami bagaimana budi daya yang tepat dalam penanaman tebu, bahkan sebagian diantara mereka yang tahu dan paham lebih memilih tidak melakukannya karena menganggap hal ini tidak terlalu penting.

Pemerintah menyadari bahwa sistem penerangan dan penyuluhan kepada para petani mengenai pelaksanaan

Inmas dan Bimas itu yang dilaksanakan selama ini kurang berhasil. Hal ini terbukti dari banyaknya para petani yang belum mengetahui secara jelas mengenai penggunaan pupuk dan bibit unggul. Penyuluhan yang kurang maksimal dari pemerintah ditengarai menjadi penyebab ketidaktahuan petani dalam menjalankan proses budi daya tebu yang tepat, karena jumlah petugas penerangan program ini sangat sedikit dan tidak seimbang dengan jumlah desa-desa sasaran program.

Pada beberapa kasus di kebun, gulma merupakan masalah yang sulit diatasi. Akibatnya pertumbuhan tebu menjadi terhambat dengan adanya gulma. Menurut Kuntohartono dan Sasongko, persaingan dengan gulma dapat menurunkan hasil bobot tebu. Dimana waktu persaingan terbesar terjadi pada bulan pertama setelah penanaman. Kuntohartono dan Tarman, usaha pengendalian gulma secara kimiawi merupakan salah satu cara untuk menanggulangi gulma terutama setelah tanam, karena terbukti efektif menggantikan tenaga kerja manusia yang biasanya sukar diperoleh.

Dari hasil penelitian Mubyart terhadap 56 pabrik gula di pulau Jawa, diperoleh kesimpulan bahwa selama 5 tahun pelaksanaan (1975-1980), hasil gula per hektar selalu lebih rendah dari pada tebu pabrik. Hasil rata-rata menurun secara konsisten -4,7 % setiap tahunnya. Menurutnya, salah satu faktor yang cukup penting yang menjadi penyebab turunnya produksi adalah waktu penyerahan tanah oleh petani. Dalam sistem TRI petani merasa lebih bebas untuk menyerahkan tanahnya pada kelompok. Sehingga waktu taman sebagian TRI umumnya tertunda antara 2-3 bulan. Hal ini tentunya juga mengakibatkan penundaan masa giling, yang sekaligus akan menurunkan tingkat rendemen atau hasil tebu per hektarnya.

Seperti yang telah digambarkan pada bagian awal tentang pemasaran gula, pemerintah telah mengatur dalam SK Menteri perdagangan dan koperasi tanggal

22 november 1980, semua gula yang dihasilkan oleh PG termasuk gula bagian petani dibeli oleh pemerintah (BULOG) melalui KUD. Hal ini bertujuan agar petani mendapatkan harga yang layak bagi tebu yang dihasilkannya, serta untuk menjaga stabilitas harga gula untuk konsumen. Oleh sebab itu pemasaran gula petani menjadi lebih tertib dan tidak ada persaingan antar pedagang (tengkulak). Peranan Bulog menjadi sangat penting didalam proses pengendalian harga gula karena peredaran dan harga gula nasional semuanya tersentral pada satu badan, Bulog sendiri bertugas mengatur sedemikian rupa agar baik produsen maupun konsumen tidak akan dirugikan dalam hal jual beli gula.

Kesimpulan

Magetan mempunyai sejarah yang erat hubungannya dengan kerajaan Mataram, yaitu merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Mataram dibawah pemerintahan Sultan Amangkurat I. Bupati pertamanya adalah Basah Gondho Kusumo yang oleh kakeknya (Basah Suryaningrat) di wisuda menjadi penguasa pertama ditempat tersebut sebagai bupati dengan gelar Yosonegoro pada 12 oktober 1675. (Anonym, 1987: 1)

Program tebu rakyat intensifikasi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi gula. Program ini semula juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani sebagai pemilik tanah agar mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari pada hanya menyewakan tanahnya kepada pabrik gula. Beberapa wilayah di Indonesia, di Jawa khususnya menjadi sasaran dari program ini, karena tidak dimungkinkan lagi untuk membuka lahan baru sebagai perkebunan tebu. Hal ini karena selain dipakai sebagai lahan hunian, juga karena pada masa itu juga dilaksanakan program Bimas tanaman pangan. Sehingga persaingan penggunaan lahan ini menyebabkan sulitnya mendapatkan petani yang bersedia menanam tebu di sawah miliknya.

Hal ini tentu dapat membuat beban biaya hidup yang lebih berat, karena mereka memerlukan banyak tenaga di luar keluarga untuk mengerjakan lahannya sehingga ongkos produksi di tingkat petani menjadi tinggi dan kurang menguntungkan bagi petani. Walaupun begitu mereka harus tetap melaksanakan program ini di tanah milik mereka, sebab cara yang digunakan perangkat desa dalam menggerakkan program TRI ini membuat para petani tidak bisa berbuat banyak. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemerintah kepada petani melalui perantara perangkat desa untuk membuat TRI berjalan dengan baik ada tiga cara, yaitu dengan cara mobilisasi, koersi melalui berbagai ancaman dan partisipatif tanpa ancaman. Hal yang sama juga terjadi dengan cara yang digunakan perangkat desa dalam menggerakkan program-program pemerintah lainnya, cara-cara mobilisasi dan koersi lebih banyak digunakan dibanding partisipatif. Berbagai persoalan sosial yang terjadi pada saat penerapan program ini yang pada akhirnya membuat program ini tidak berjalan dengan baik.

Berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan program TRI ini akan membantu para petani baik dari segi teknis maupun bantuan berupa kredit usaha sebagai modal awal para petani. Beberapa pihak yang diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan dan proses program pemerintah ini adalah sebagai berikut: 1. Dinas Pertanian, hal-hal yang harus dilakukan oleh Dinas Pertanian adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk membimbing petani agar proses penanaman tebu berjalan baik, dengan cara penyuluhan ini maka diharapkan hasil tebu yang dihasilkan oleh petani akan berkualitas baik, karena sudah dilakukan dengan teknik-teknik yang benar, 2. Perusahaan Pabrik Gula, dalam hal ini pihak perusahaan pabrik bertanggung jawab sebagai pembimbing bagi para petani serta bertanggung jawab atas pengolahan bahan baku yang di dapat dari petani menjadi gula, 3. Bank, fungsi bank

disini adalah untuk memberi kemudahan dalam hal finansial petani, yaitu dengan penyaluran kredit untuk usaha petani, dalam hal ini bank yang di tunjuk untuk melaksanakan tanggung jawab ini adalah Bank BRI, 4. Koperasi Unit Desa (KUD), sebagai wadah bagi para petani maka KUD bertanggung jawab atas jalannya distribusi dalam penyediaan sarana produksi. Hal ini merupakan fase penting dalam hal memudahkan petani untuk menyalurkan hasil panennya kepada Perusahaan pabrik gula, dan 5. BULOG, sebagai badan yang bertanggung jawab atas stabilisasi harga gula, maka BULOG sebagai tangan kedua sebagai distributor bertugas untuk membeli gula dari pabrik gula dan juga dari bagian petani dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

Buku :

- Abdurrahman Dudung. 2007. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Bisuk Siahaan. 1996. *Industrialisasi di Indonesia Sejak Hutang Kehormatan sampai Banting Stir*, Jakarta: Deperindag.
- Helius. 2007. *Metodologo Sejarah*, Yogyakarta: Ombak.
- Kano Hiroyosi dkk. *Di Bawah Asap Pabrik Gula Masyarakat Desa Pesisir Jawa Sepanjang Abad Ke-20*. Yogyakarta: Akatiga dan Gadjah Mada University Press.
- Khudori, 2005. *Gula Rasa Neoliberalisme: Pergumulan Empat Abad Industri Gula*. Jakarta: LP3ES.
- M. C. Ricklefs. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta:

Serambi Ilmu Semesta.

- Nasution Sjamsudin. 2008. *Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial (1830-1930)*. Surabaya: Intelektual.
- Rachmat Susaty. 2007. *Industri Gula di Kabupaten Kendal Pada Masa Kolonial*.
- Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan Indonesia*, Yogyakarta, Aditya Media.
- Soe Hok Gie. 1999. *Dibawah Lentera Merah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Van Niel, Robert. 2003. *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, Jakarta: LP3ES.
- Siahaan, Bisuk, *Industrialisasi di Indonesia sejak hutang kehormatan sampai banting stir*, Jakarta: Deperindag, 1996.
- Tri Candra Aptianoa. 2005. *Kota Lama Kota Baru*. Yogyakarta: Ombak.
- Nara Sumber:**
1. Nama : Pambudi
Umur : 59 tahun
Pekerjaan : Ketua KPTR Gunung Madu Magetan
 2. Nama : Sumarwidi
Umur : 52 tahun
Pekerjaan : kepala bidang perkebunan dinas kehutanan dan perkebunan kota Magetan
 3. Nama : Suparman
Umur : 78 tahun
Pekerjaan : mantan kepala desa Randusongo (periode 1975-1983)